



Media Title	Bisnis Indonesia		
Head Line	Pembiayaan Pusat Tetap Dibutuhkan		
Date	24 Maret 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	30	Article Size	
Journalist	Rachmat Subiyanto	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

► TOL KALTIM

Pembiayaan Pusat Tetap Dibutuhkan

BALIKPAPAN—Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih berharap kepada pemerintah pusat untuk mendanai pembiayaan proyek jalan tol Balikpapan - Samarinda sepanjang 99,02 kilometer.

Rachmat Subiyanto
rachmad.subiyanto@bisnis.co.id

Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mengatakan jalan tersebut merupakan bagian dari proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Karena itu, dukungan dari pemerintah pusat diperlukan agar proyek jalan ini bisa rampung dikerjakan.

"Jalan tol ini sudah masuk dalam MP3EI. Kami masih menunggu bantuan dari pusat dan BUMN untuk merealisasikan proyek ini," ujarnya, Sabtu (23/3).

Dia menyebutkan skema *public private partnership* (PPP) menjadi salah satu hal yang mungkin untuk

► Skema PPP mungkin bisa dilakukan untuk merealisasikan proyek.

► Pemprov sedang mempercepat proses pengesahan RTRW.

dilakukan dalam merealisasikan proyek jalan tol ini. Beberapa BUMN, melalui instruksi dari menteri, pernah diarahkan untuk merealisasikan proyek ini.

"Kami masih menunggu kelanjutannya karena sudah ada komunikasi."

Berdasarkan data awal, jalan tol yang akan menjadi jalan bebas hambatan pertama di Pulau Kalimantan ini, kebutuhan dana sebesar Rp6,2 triliun. Pemprov Kaltim melalui skema anggaran tahun jamak telah menganggarkan dana sebesar Rp2 triliun untuk pembangunan jalan tol tersebut.

Kendati demikian, dalam daftar penggunaan anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum tahun ini ada alokasi pekerjaan untuk pelaksanaan paket jalan tol mencapai Rp100 miliar. Selain itu, pemprov juga masih akan melakukan pembebasan lahan yang dilalui oleh jalan tol tersebut.

Awang juga mengaku sedang mempercepat proses pengesahan rencana tata ruang dan tata wilayah (RTRW) Kaltim yang didalamnya memuat peralihan area Taman Hutan Raya

(Tahura) Bukit Soeharto menjadi area penggunaan lain (APL) agar bisa dilalui oleh jalan tol tersebut.

Adapun rencana penganggaran secara tahun jamak, Awang mengaku masih belum memutuskannya mengingat masih banyaknya kebutuhan lain yang perlu dibiayai oleh pemerintah.

Dia menilai kucuran anggaran sebesar Rp2 triliun yang dilakukan pada periode sebelumnya menjadi andil daerah dalam proyek ini.

STIMULAN INVESTOR

Anggota Komisi V DPR RI Hetifah Sjaifudien mengatakan subsidi pembangunan jalan tol tersebut memungkinkan untuk dilakukan sebagai stimulan bagi para investor berinvestasi di proyek pemerintah.

"Subsidi ini bisa saja dilakukan agar investor tertarik masuk," tuturnya.

Keberadaan BUMN juga diharapkan bisa membantu mendorong percepatan realisasi proyek tersebut.

Proses pengambilan keputusan yang lebih cepat karena menggunakan skema bisnis menjadi salah satu keunggulan BUMN untuk bisa menggarap proyek ini.

Pada pertengahan tahun lalu, Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan belum dapat memastikan kelanjutan pembangunan proyek jalan tol ini karena belum ditetapkan trase.

Dirjen Bina Marga Djoko Murdjanto

mengatakan pihaknya masih menunda realisasi proyek tol tersebut. "Masih kendala lahan sehingga trase belum bisa ditetapkan." (*Bisnis*, 13 Juni 2013).

Saat ini, pengerjaan jalan tol mengalami masalah karena pembebasan tanah menabrak kawasan hutan lindung Tahura Bukit Soeharto serta Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW).

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Achmad Gani Gazaly mengatakan kepastian pembebasan lahan di hutan lindung tersebut menjadi kendala terbesar sehingga proyek tersebut belum ada perkembangan. (*Zufriat*)

Profil Jalan Tol Balikpapan-Samarinda

